



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

SKRINING KESEHATAN GRATIS BAGI PELAJAR UNTUK INVESTASI MASA DEPAN

Nur Sholikhah Putri Suni
Analisis Legislatif Ahli Muda
nur.sunid@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Penyakit tidak menular (PTM) pada anak usia sekolah kini menjadi fokus utama dalam agenda kesehatan nasional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa gangguan metabolik, seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi, mulai muncul pada kelompok usia yang lebih muda. Bahkan, prevalensi anak usia sekolah yang mengalami diabetes mencapai 13 persen. Di sisi lain, data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat bahwa sekitar 11,9 persen pelajar usia 5–12 tahun mengalami berat badan lebih dan 7,8 persen mengalami obesitas. Angka tersebut diperkuat oleh data Global School-based Student Health Survey (GSHS) Indonesia tahun 2022, yang mencatat 10,8 persen pelajar usia 13–17 tahun mengalami berat badan lebih dan obesitas, serta 6,7 persen mengalami tekanan darah tinggi. Faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap kondisi ini antara lain kebiasaan sedenter; konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak; serta kurangnya aktivitas fisik.

Jika tidak segera ditangani, peningkatan PTM pada anak usia sekolah akan berdampak serius bagi perkembangan anak. Gangguan kesehatan kronis sejak dini bisa memengaruhi konsentrasi belajar, prestasi akademik, dan perkembangan sosial-emosional anak. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Anak-anak akan berisiko tumbuh menjadi individu dengan keterbatasan produktivitas yang pada akhirnya memengaruhi partisipasi ekonomi dan pencapaian pembangunan nasional.

Oleh sebab itu, pemerintah terus mendorong transformasi pelayanan kesehatan dengan memperkuat pendekatan promotif dan preventif sebagai fondasi pembangunan SDM unggul. Salah satu strategi utama yang kini dijalankan adalah pelaksanaan skrining kesehatan bagi anak usia sekolah dasar hingga menengah atas. Program ini merupakan bagian dari delapan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sekaligus langkah sistematis untuk menjamin deteksi dini kondisi kesehatan fisik dan mental anak usia sekolah. Melalui skrining, diharapkan berbagai gangguan kesehatan dapat teridentifikasi lebih awal sehingga dapat ditangani secara cepat dan efektif. Strategi ini juga mendukung peningkatan kualitas hidup.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan lebih dari 53 juta pelajar di seluruh Indonesia untuk melakukan skrining kesehatan gratis yang dimulai Juli 2025 dan dijalankan secara bertahap. Program ini mencakup kerja sama lintas sektor antara lebih dari 282 ribu sekolah dengan melibatkan unit kesehatan sekolah (UKS) dan 10 ribu puskesmas. Pemeriksaan meliputi kesehatan fisik dan jiwa, termasuk deteksi dini masalah gizi, penglihatan, pendengaran, kesehatan gigi, dan gangguan psikologis. Agar implementasi program skrining ini berhasil, diperlukan sistem yang menyeluruh, terstandar, dan mudah diakses oleh seluruh peserta didik, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan.

Tujuan jangka panjang dari skrining adalah menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan siap bersaing dalam menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, dengan adanya skrining kesehatan bagi pelajar, maka kasus gizi buruk, anemia, gangguan

pertumbuhan, serta masalah kesehatan mental, seperti kecemasan atau depresi ringan dapat teridentifikasi sejak dini. Pelaksanaan yang komprehensif dan tindak lanjut yang tepat, program skrining akan berdampak besar tidak hanya pada kesehatan anak tetapi juga pada sistem pendidikan dan sosial. Lebih lanjut, data hasil skrining dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan program kesehatan dan pendidikan yang lebih presisi. Informasi ini bisa digunakan untuk menyesuaikan kurikulum, merancang program gizi sekolah, serta mengembangkan layanan psikososial berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Atensi DPR

Komisi IX DPR RI memiliki peran krusial dalam menjamin keberhasilan program skrining kesehatan gratis bagi pelajar melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Dalam fungsi anggaran, Komisi IX DPR RI perlu mendorong alokasi dana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung penguatan puskesmas, pelatihan tenaga medis, dan tenaga kesehatan, serta pengadaaan alat skrining. Dalam fungsi legislasi, Komisi IX DPR RI dapat mendorong Kemenkes untuk menerbitkan regulasi teknis pelaksanaan skrining kesehatan pelajar. Sementara dalam fungsi pengawasan, Komisi IX dapat menyelenggarakan rapat kerja bersama Kemenkes untuk mengevaluasi pelaksanaan program, serta memastikan tindak lanjut pascaskrining berjalan optimal. Dengan langkah-langkah teknis dan koordinatif ini, Komisi IX DPR RI turut menjamin program berjalan efektif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Sumber

badankebijakan.kemendes.go.id, 2025;
kompas.com, 1 & 4 Juli 2025;
tempo.co, 3 Juli 2025.

Minggu ke-1 Juli
(30 Juni s.d. 6 Juli 2025)

2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*